

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Rekonsiliasi pascakonflik merupakan proses yang bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial, membangun kembali kepercayaan, dan menciptakan perdamaian berkelanjutan antara kelompok yang pernah mengalami ketegangan atau kekerasan (Lederach, 1999, Staub, 2006). Dalam konteks wilayah perbatasan Motaain, pasar rakyat bukan hanya berfungsi sebagai ruang ekonomi, tetapi juga sebagai arena sosial tempat berlangsungnya pertemuan, komunikasi, dan pertukaran budaya antara masyarakat eks Timor-Timur dan warga Timor-Leste.

Peneliti menduga bahwa rekonsiliasi sosial di kawasan perbatasan tidak hanya terbentuk melalui kebijakan formal, melainkan melalui interaksi keseharian yang terjadi secara alami. Pasar rakyat, sebagai ruang sosial yang inklusif, diyakini memainkan peran penting dalam membentuk hubungan baru yang lebih damai. Dengan mengidentifikasi empat indikator penelitian berdasarkan teori praktik sosial Pierre Bourdieu, peneliti menemukan bahwa:

1) Habitus

Pasar rakyat di perbatasan Motaain telah berfungsi sebagai arena kritis yang memicu terjadinya transformasi habitus yang signifikan di kalangan masyarakat perbatasan, baik warga eks Timor-Timur/Indonesia maupun warga

Timor-Leste. Habitus lama yang dicirikan oleh ketidaknyamanan, kecurigaan, dan jarak emosional pascakonflik, kini telah bergeser menjadi habitus baru yang menekankan keterbukaan, saling percaya, dan solidaritas. Pergeseran fundamental ini didorong oleh pengalaman kolektif baru yang intensif melalui interaksi pasar mingguan, yang diperkuat oleh kesadaran yang mengakar bahwa mereka secara historis merupakan satu rumpun dan memiliki ikatan keluarga atau budaya yang sama. Dengan demikian, pasar Motaain bertindak sebagai katalis untuk rekonsiliasi tanpa seremoni (*grassroots reconciliation*), di mana perdamaian dan kepercayaan tidak tercipta melalui program formal, melainkan dibangun secara mandiri oleh masyarakat melalui praktik sosial sehari-hari seperti saling menyapa, berbagi makanan, dan memanfaatkan budaya serta bahasa lokal (Tetun) sebagai jembatan. Proses organik ini menghasilkan fondasi perdamaian yang kokoh dan berkelanjutan di tingkat akar rumput.

2) Modal (ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik)

Pasar rakyat Motaain telah berhasil mengkonversi berbagai jenis modal menjadi instrumen penyeimbang dan rekonsiliasi sosial. Modal Ekonomi tidak hanya mewujudkan amanat Presiden untuk menciptakan "pertumbuhan ekonomi baru", tetapi juga berfungsi sebagai pendorong rekonsiliasi; hal ini ditopang oleh regulasi formal yang jelas dari PLBN Motaain (misalnya tarif lapak Rp 3.400/hari) dan dukungan fungsional (seperti mobil kas keliling Bank NTT) yang memfasilitasi perputaran uang dan akses harga terjangkau bagi warga Timor-Leste. Di dalam praktiknya, aktivitas ekonomi di pasar ini tidak

hanya dijalankan oleh pedagang lokal, tetapi juga melibatkan pedagang Bugis yang turut berjualan di pasar Motaain, sehingga memperluas jaringan interaksi ekonomi lintas identitas dan memperkaya dinamika pasar. Keberhasilan ekonomi ini diperkuat oleh Modal Sosial berupa jaringan kepercayaan yang erat dan keakraban antarwarga, yang terwujud dalam hubungan harmonis layaknya keluarga, serta didukung oleh jaminan keamanan dari PLBN dan Imigrasi yang menumbuhkan ketertiban. Sementara itu, Modal Budaya menjadi perekat primordial yang esensial, memanfaatkan kesamaan budaya serumpun, ikatan Rumah Adat (*Uma Lulik*), dan praktik toleransi bahasa (penggunaan Tetun/Indonesia) sebagai fondasi komunikasi. Terakhir, Modal Simbolik tercermin dari citra positif dan rasa saling percaya yang diberikan oleh negara melalui fasilitasi akses sederhana (hanya KTP/identitas tanpa paspor) oleh PLBN, yang menciptakan kebanggaan kultural bagi warga perbatasan karena mampu menjadi jembatan sosial dua negara. Dengan demikian, interaksi modal ini secara holistik menopang praktik perdamaian.

3) Arena

Arena pasar Motaain telah berhasil diformalkan oleh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) menjadi ruang publik yang inklusif dan tertib, ditandai dengan keadilan akses yang fleksibel. Keadilan ini terwujud dalam kebijakan yang mengizinkan warga Timor-Leste berinteraksi di zona PLBN hanya dengan menunjukkan kartu identitas, tanpa persyaratan paspor, yang melambangkan penghormatan terhadap ikatan kekerabatan. Namun, kebijakan akses ini

mengalami pengetatan setelah muncul kecenderungan warga Timor-Leste untuk tidak hanya beraktivitas di area pasar, tetapi juga bergerak lebih jauh hingga hingga keluar dari zona pasar . Jika sebelumnya lebih dari 150 orang dapat masuk secara bebas setiap hari pasar Motaain, kini PLBN membatasi hanya sekitar 60 orang yang diizinkan masuk ke arena pasar Motaain. Pembatasan ini merupakan langkah imigrasi untuk menjaga kontrol mobilitas lintas batas tanpa menghapus ruang interaksi sosial dan ekonomi yang telah berjalan. Pemindahan dan penataan pasar ke dalam zona PLBN sejak tahun 2019 telah menciptakan keteraturan, struktur, dan transparansi (adanya lapak, ruko, dan retribusi resmi), yang memberikan kepastian bagi pedagang kecil. Secara keseluruhan, arena ini merefleksikan peran ganda negara sebagai pengatur dan fasilitator keamanan (*security*), sekaligus penjaga keseimbangan antara penegakan aturan formal dan kebutuhan kebebasan sosial warga, yang pada akhirnya melahirkan rasa aman dan adil.

4) Praktik

Praktik sosial yang berlangsung di pasar rakyat Motaain merupakan hasil fusi dinamis dan spontan antara elemen-elemen kerangka Bourdieu mulai dari habitus yang bertransformasi (pola pikir dan keterbukaan), percampuran aneka modal (ekonomi, sosial, budaya , dan simbolik), hingga arena yang menjamin akses yang adil. Aktivitas di pasar ini melampaui sekadar transaksi ekonomi; ia mencakup praktik perdamaian harian yang menghasilkan ikatan sosial yang kokoh, seperti saling membantu mengangkut barang, berbagi

informasi, dan berbincang santai. Hal yang krusial, praktik-praktik ini muncul secara organik dari rutinitas warga sendiri. Temuan ini dengan jelas menunjukkan bahwa perdamaian yang tahan lama di perbatasan tidak muncul dari regulasi formal semata, melainkan berkembang secara perlahan melalui pertemuan berulang dan interaksi autentik yang konsisten.

6.2 Saran

Untuk mewujudkan keadilan akses yang sejati dalam Arena pasar Motaain dan memperkuat fungsi modal ekonomi secara resiprokal, disarankan agar Pemerintah Indonesia (melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan/PLBN) mengimplementasikan kebijakan resiprokal yang terfokus. Kebijakan ini harus berupa program percontohan kuota lapak terbatas yang secara spesifik memfasilitasi partisipasi warga Timor-Leste sebagai pedagang, bukan hanya sebagai pembeli. Langkah ini penting untuk mengatasi kesenjangan yang ada, memastikan bahwa modal ekonomi dapat dimanfaatkan secara setara oleh kedua belah pihak, serta memperdalam ikatan sosial yang telah terbentuk melalui praktik dagang bersama, sehingga menciptakan mekanisme pasar bersama yang lebih adil dan berkelanjutan di perbatasan.